

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Ghofur Ansori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press: Yogyakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana: Jakarta.
- Desy Anwar. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Amelia: Surabaya.
- Erwin Halim. 2014. *Untung Besar dengan Bisnis Properti*. KOBIS: Yogyakarta.
- Farida Patittingi. et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Pranadamedia Group: Jakarta.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- _____. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama: Bandung.

- Hans Kelsen. 2018. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media: Bandung.
- Herlien Budiono. 2018. *Demikian Akta Ini*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009. *Kenotariatan Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- , 2020. *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kahar. 2017. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Gunadarma Ilmu: Samata-Gowa.
- Liliana Tedjosaputro. 1991. *Mal Praktik Notaris dalam Hukum Pidana*. CV. Agung: Semarang.
- Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press: Yogyakarta.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Rusdianto Sesung *et al.* 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A.De.Rozarie: Surabaya.
- Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Tan Thong Kie. 2017. *Studi Notariat*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

United Nations. 1996. United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II). Reports: Istanbul (Turkey).

Jurnal dan Tesis

Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016.

Andry Akbar, Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Pada Masyarakat Tidak Mampu, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2020.

Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 3, 2011

Florence Permenta Br. Manik, Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang menolak memberikan jasa berupa bantuan hukum Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

Helena Sheila Arkisanti Kristyanto dan Fifiana Wisnaeni, "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)", Notarius, Nomor 2, 2018.

Khairul Iman Susanto, Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Di Kabupaten Brebes,

Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Volume 7, 2020.

Latifah, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notrais, *Officium Notarium*, No. 1 Vol. 1. 2021.

Sigit Somadiyono, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu", *Lex Specialis*, 2017.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris Indonesia) S. 1860-3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 4380)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-cuma dan Kode Etik Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22).

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 178).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
264)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 20/Prt/M/2019 Tentang Kemudahan Dan
Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1667).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/Pmk.010/2019
Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama
Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya Yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
588).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2020).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021
Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).

Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas
Ikatan Notaris Indonesia Balikpapan, 12 Januari 2017.

Internet

Al Khoriah Etiek Nugraha, *Besaran Gaji UMR Makassar 2022 yang jadi Acuan Pemberian THR*, detik.com, 2022.

Annisa Mutia, *Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 272,23 Juta Jiwa pada 30 Juni 2021*, databoks.katadata.co.id, 2021.

Hendri Pranata, *Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR*, <https://adoc.pub/bab-ii-kajian-teori-Masyarakat-berpenghasilan-rendah-yang-se.html>, 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/honorarium>, 8 Agustus 2022.

Nugroho Nafika, *Penduduk Miskin Makassar 74.690 Jiwa*, Bisnis.com, 2022.

Nizzah Amalia Subchan, *Signifikansi Teori Dan Theory Building Dalam Penelitian Ilmiah*, studocu.com, 2021.

Rosnidar Sembiring, *Kedudukan AKta Autentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata*, http://mkn.usu.ac.id/images/Kedudukan_Akta_Autentik_Yang_Dibuat_Dihadapan_Notaris_Dalam_Hukum_Pembuktian_Acara_Perdata/pdf., 2022.

Wikipedia, *Kemiskinan*, (Online) di akses <https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, pada 8 Agustus 2022.

Wilson Pompana, *Kedudukan Hukum PPJB Dalam Proses Jual Beli Tanah*, hukumonline.com, 2021.

Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Sekretaris MPDN Kota Makassar, Andi Fachruddin, pada tanggal 29 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ketua MPDN Kota Makassar, Muhammad Yani, pada tanggal 12 April 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Brillian Thioris, pada tanggal 16 April dan 14 Agustus 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Sahabuddin Nur, pada tanggal 18 April 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Hustam Husain, pada tanggal 18 April dan 8 Agustus 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, M. J. Grace Josefina Kawi Tandiari, pada tanggal 18 April 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Niny Savitry, pada tanggal 19 April 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Syahrir Madeali, pada tanggal 19 April 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Endang Soelianty, pada tanggal 19 April 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Mestariany Habie, pada tanggal 19 April 2022.

Wawancara dengan Notaris, Ketua PENGDA INI Kota Makassar, Muhammad Asyik Noor, pada tanggal 20 April 2022.

Wawancara dengan Anggota MPWN Kota Makassar, Prof. Syamsul Bachri, pada tanggal 18 Mei 2022.

Wawancara dengan Notaris Kab. Maros, Abdurrifai, pada tanggal 20 Mei 2022.

Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Ria Trisnomurti, pada tanggal 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan Pelaku Pembangunan Perumahan Armada Arjuna Rahmad Residence, Junaidi, pada tanggal 9 Agustus 2022.

LAMPIRAN





Wawancara dengan Sekretaris MPDN Kota Makassar, Andi Fachruddin, pada tanggal 29 Oktober 2021.



Wawancara dengan Ketua MPDN Kota Makassar, Muhammad Yani, pada tanggal 12 April 2022.



Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Brillian Thioris,
pada tanggal 16 April 2022.



Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Sahabuddin Nur,
pada tanggal 18 April 2022.



Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Hustam Husain,
pada tanggal 18 April 2022.



Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Niny Savitry,
pada tanggal 19 April 2022.



Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Syahrir Madeali,
pada tanggal 19 April 2022.



Wawancara dengan Notaris Kota Makassar, Mestariany Habie,
pada tanggal 19 April 2022.



Wawancara dengan Notaris, Ketua PENGDA INI Kota Makassar, Muhammad Asyik Noor, pada tanggal 20 April 2022.



Wawancara dengan Pelaku Pembangunan Kota Makassar, Junaidi, Pada Tanggal 9 Agustus 2022